

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman orde baru sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem sentralisasi yang semua hal harus berdasarkan petunjuk dari pusat. Namun saat ini sistem tersebut telah ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Sejak bergulir masa reformasi, maka sistem desentralisasi diberlakukan, dan sistem sentralisasi ditinggalkan. Setiap daerah diberikan kebebasan untuk menentukan perkembangan wilayahnya masing – masing.

Mengingat sistem yang demikian, maka setiap pemerintah daerah akan berusaha untuk meningkatkan wilayah kerjanya masing – masing. Setiap kepala daerah berusaha untuk memaksimalkan semua aparatur yang dimilikinya untuk mengembangkan wilayahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Tidak kecuali untuk Pemerintah Kota Medan, yang terdiri dari 21 Kecamatan, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Agar memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai, Pemerintah Kota Medan mendelegasikan wewenang yang dimilikinya kepada setiap Camat di tingkat Pemerintahan Kecamatan.

Kecamatan Medan Kota sebagai salah satu kecamatan yang berdiri di wilayah Kota Medan juga memiliki tanggung jawab yang sama. Kecamatan Medan Kota dibagi menjadi 12 Kelurahan, dengan luas keseluruhan kecamatan adalah mencapai 5,98 Km². Dengan jumlah wilayah yang luas tersebut, jumlah

aparatur pemerintahan di Kecamatan Medan Kota pada tahun 2011 memiliki jumlah sebanyak 227 orang. Yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Medan Kota
Menurut Instansi dan Golongan
Tahun 2011

| No | Instansi | Golongan | | | | | Jumlah |
|-----------------|-------------------------|----------|----|-----|----|---------|--------|
| | | I | II | III | IV | Lainnya | |
| 1 | Kantor Camat | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 41 |
| 2 | Kantor Urusan Agama | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Statistik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | PPLKB | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Pertanian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | PD. Kebersihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Puskesmas | 0 | 18 | 67 | 7 | 0 | 92 |
| 8 | Kelurahan | 2 | 4 | 54 | 0 | 0 | 60 |
| 9 | Dinas P & K | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 10 | Dinas Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Aparatur | | 2 | 40 | 171 | 14 | 0 | 227 |

Sumber: Kecamatan Medan Kota Dalam Angka, 2012

Aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak bagi pemerintahan dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan wewenang untuk menjalankan setiap tanggung jawab yang diberikan. Keberhasilan suatu organisasi, sedikit banyak tergantung pada pegawai sebagai pelaksana dan pimpinan penyelenggara organisasi tersebut. Gedung – gedung yang menjulang tinggi, perlengkapan kantor yang lengkap dan canggih adalah benda – benda non produktif dan hanya bisa efektif dan efisien jika dikelola oleh pegawai yang memiliki kemampuan, bertanggung jawab, memiliki kesadaran yang tinggi dan kemauan yang kuat untuk mencapai cita – cita dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, faktor pegawai adalah komponen yang sangat

penting dalam organisasi (Diah, 2013:43). Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 227 orang aparatur yang terdistribusi pada 10 instansi tersebut harus melayani penduduk di Kecamatan Medan Kota yang berjumlah 72.580 orang yang terdiri dari 26.913 adalah penduduk dari keturunan Tionghoa dan sisanya adalah warga pribumi.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan tentang kinerja pegawai atau aparatur yang bekerja di Kantor Kecamatan Medan Kota, dan tidak meneliti secara keseluruhan Kecamatan Medan Kota. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat Medan Kota terhadap staf pegawai yang berada di bawah jajarannya.

Salah satu kunci agar tujuan pemerintahan daerah khususnya pemerintahan Kecamatan Medan Kota untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, harus meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Setiap aparatur pemerintahan, baik pimpinan sampai dengan bawahan harus mampu dan memiliki niat serta bekerja keras untuk dapat mencapai kinerja yang tinggi. Menurut Mangkunegara (2005:67) “kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari kinerja aparatur negara, dapat dilihat dari kemampuan aparatur pemerintahan kecamatan menyelesaikan pekerjaan sebanyak mungkin, dan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat baik. Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 1979

tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil salah satu unsur yang dinilai adalah prestasi kerja, dimana prestasi kerja itu yang diukur adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di Kecamatan Medan Kota, khususnya pada Kantor Kecamatan Medan Kota adalah dengan melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan tersebut. Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pimpinan dalam hal ini adalah Camat Medan Kota sangat perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan – penyelewengan atas setiap pekerjaan, baik penyelewengan tanggungjawab maupun penyelewengan tugas. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik

alasanya karena faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkan petunjuk yang akan dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan pengawasan (Victor, 1994:39).

Hal – hal yang sangat jelas tampak bahwa, pegawai yang bekerja di Kantor Camat Medan Kota melakukan penyelewengan waktu mereka bekerja. Tingkat disiplin yang rendah ini menyebabkan secara keseluruhan kualitas kerja pegawai Kantor Camat Medan Kota menjadi rendah. Sebab disiplin waktu yang rendah ini telah memakan waktu yang banyak sehubungan dengan menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawab mereka. Selain itu, pelayanan yang diharapkan maksimal oleh Pemerintah Kota Medan melalui Camat Medan Kota kepada masyarakat menjadi tidak baik.

Masalah disiplin waktu ini akan terkait nantinya dengan masalah tingkat kejujuran mereka dalam bekerja, ketaatan dalam menjalankan tugas yang telah didelegasikan, kesetiaan terhadap bangsa yang menuntut agar setiap aparatur Negara harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya serta akan terkait juga dengan masalah prestasi kerja pegawai yang sangat rendah. Oleh sebab itu, pengawasan yang maksimal dari Camat Medan Kota sangat dibutuhkan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengawasan dan

peningkatan kinerja aparatur pemerintahan khususnya pada aparatur/pegawai di Kantor Kecamatan Medan Kota, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Medan Kota”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan pada latar belakang masalah pada penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Medan Kota
2. Seberapa besar pengawasan mempengaruhi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Medan Kota

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat disusun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Medan Kota
2. Untuk mengetahui besarnya pengawasan mempengaruhi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Medan Kota

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Master Administrasi Publik (MAP) di Universitas Medan Area (UMA) Medan.
2. Menjadi salah satu sumbangan bagi dunia pendidikan tentang Pengawasan dan Kinerja, khusus pada aparatur pemerintah.
3. Dapat memberikan masukan pada Pemerintah Kecamatan Medan Kota sehubungan dengan perlunya pengawasan terhadap kinerja di Kecamatan Medan Kota
4. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang membahas tentang hal yang sama.

1.5. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian sama dengan kerangka bangun, kerangka konseptual dari penelitian yang akan dilakukan. Hubungan yang terjadi antara variabel, baik variabel yang terikat maupun variabel yang tidak terikat akan tampak pada kerangka penelitian ini. Menurut Sugiono (2006:49) yang kerangka penelitian adalah “sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan”. Hubungan variabel yang terjadi dihubungkan melalui indikator – indikator dari setiap variabel.

Terdapat 2 variabel pada penelitian ini, yaitu variabel pengawasan (variabel bebas) dan variabel peningkatan kinerja (variabel terikat). Menurut Ardianto, dkk (2013) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh sangat dominan terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta, dkk (2013) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja

namun tidak dominan. penelitian yang dilakukan oleh Abyad (2013) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh sangat kuat terhadap peningkatan kinerja pegawai di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kusmanto dan Sunarso (2007) menunjukkan bahwa pengawasan melekat akan sangat mempengaruhi kemajuan sebuah institusi.

Melihat hasil penelitian yang dinyatakan oleh peneliti sebelumnya, maka sangat jelas bahwa pengawasan merupakan variabel yang mampu untuk meningkatkan kinerja. Artinya terdapat hubungan yang positif antara pengawasan dengan peningkatan kinerja. Ketika pengawasan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan kinerja.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kerangka penelitian ini, maka dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1
Kerangka Penelitian

1.6. Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka penelitian ini, maka penulis dapat menetapkan yang menjadi hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai “Terdapat pengaruh Pengawasan yang positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Medan Kota”.